

Kontroversi Implementasi Tapera: Perlindungan Hak Pekerja atau Beban Tambahan?

Rizky Falian Akbar

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia

email: akbarfalian2@gmail.com

Abstrak Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bertujuan memperluas akses perumahan bagi pekerja di Indonesia melalui skema tabungan wajib yang dipotong dari upah. Meskipun diharapkan dapat membantu pekerja memiliki rumah dan mendukung program perumahan nasional, implementasi Tapera menuai kontroversi. Di satu sisi, Tapera dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial yang memperkuat hak pekerja, tetapi di sisi lain, banyak yang khawatir kebijakan ini menambah beban finansial bagi pekerja dan perusahaan. Pemotongan gaji dianggap mengurangi daya beli, sementara perusahaan merasa kewajiban kontribusi Tapera dapat mempengaruhi stabilitas bisnis, terutama dalam situasi ekonomi yang belum stabil. Kekhawatiran juga muncul terkait pengelolaan dana dan transparansi, yang jika tidak diawasi dengan baik, dapat merugikan peserta. Artikel ini menganalisis kontroversi seputar Tapera dari perspektif hukum dan ekonomi, serta dampaknya terhadap sektor ketenagakerjaan dan perumahan, dengan tujuan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan tersebut agar mencapai tujuannya tanpa menimbulkan beban tambahan.

Kata Kunci: Tapera, Kebijakan Perumahan, Hak Pekerja

Abstract The Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) policy aims to expand housing access for workers in Indonesia through a mandatory savings scheme deducted from wages. While it is expected to assist workers in owning homes and support the national housing program, the implementation of Tapera has sparked controversy. On one hand, Tapera is viewed as a social protection instrument that strengthens workers' rights. On the other hand, many are concerned that this policy adds financial burdens to both workers and employers. Wage deductions are seen as reducing workers' purchasing power, while companies feel that the obligation to contribute to Tapera may affect business stability, especially in an uncertain economic environment. There are also concerns about the management and transparency of the funds, which, if not properly overseen, could harm participants. This article analyzes the controversy surrounding Tapera from a legal and economic perspective, as well as its impact on the labor and housing sectors, aiming to provide recommendations for optimizing the policy to meet its objectives without imposing significant additional burdens.

Keyword: Tapera, Housing Policy, Workers' Rights

*Correspondence Author

Email: akbarfalian2@gmail.com✉

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diakui secara universal. Di Indonesia, tantangan dalam memenuhi kebutuhan perumahan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi yang pesat, urbanisasi, dan keterbatasan lahan, terutama di wilayah perkotaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperkenalkan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang bertujuan untuk memperluas akses perumahan bagi masyarakat, khususnya bagi pekerja. Kebijakan ini diluncurkan dengan harapan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk masalah perumahan di Indonesia, melalui mekanisme tabungan wajib yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Tapera diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Sesuai dengan peraturan ini, Tapera mewajibkan pekerja, baik di sektor formal maupun informal, untuk menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan mereka sebagai tabungan yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai kepemilikan rumah. Program ini diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan sosial yang memungkinkan pekerja, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memiliki rumah layak huni.

Meskipun tujuan dari Tapera tampak jelas dan positif, implementasinya tidak terlepas dari kontroversi. Di satu sisi, kebijakan ini dipuji sebagai langkah yang proaktif dalam memperbaiki akses perumahan bagi pekerja. Pekerja, khususnya di sektor formal, seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh rumah karena terbatasnya akses pembiayaan dan harga properti yang terus meningkat. Dengan adanya Tapera, diharapkan pekerja dapat menyisihkan dana secara terstruktur untuk memenuhi kebutuhan perumahan mereka di masa depan. Selain itu, program ini juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dan konstruksi, yang dapat memberikan efek positif bagi perekonomian nasional.

Namun, di sisi lain, muncul berbagai kekhawatiran terkait dengan beban finansial yang ditimbulkan oleh Tapera, baik bagi pekerja maupun pemberi kerja. Bagi pekerja, terutama yang berpenghasilan rendah, pemotongan sebagian dari gaji bulanan mereka dapat mengurangi daya beli dan menambah tekanan ekonomi. Hal ini terutama dirasakan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, seperti dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa di berbagai sektor. Di sisi pemberi kerja, kewajiban untuk menyisihkan kontribusi bagi Tapera dipandang sebagai beban tambahan yang dapat mengganggu arus kas perusahaan, khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang sudah berjuang untuk bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit.

Selain itu, terdapat kekhawatiran terkait dengan transparansi dan efektivitas pengelolaan dana Tapera. Mengingat bahwa dana ini dikelola oleh BP Tapera yang berfungsi sebagai badan pengelola, muncul pertanyaan tentang sejauh mana dana tersebut akan dikelola dengan baik dan transparan. Kekhawatiran ini semakin diperkuat dengan pengalaman dari kebijakan serupa di masa lalu, seperti dana pensiun dan jaminan sosial, yang pengelolaannya sering kali dianggap kurang efisien dan tidak sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi peserta.

Seiring dengan berkembangnya perdebatan mengenai implementasi Tapera, beberapa pakar hukum dan ketenagakerjaan mulai mempertanyakan apakah kebijakan ini lebih berfokus pada perlindungan hak

pekerja atau justru menjadi beban tambahan yang harus ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja. Artikel ini akan mengkaji lebih dalam kontroversi seputar kebijakan Tapera, dengan meninjau dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan ini serta menawarkan rekomendasi untuk optimalisasi Tapera agar dapat mencapai tujuan awalnya, yaitu memberikan akses perumahan yang layak bagi pekerja, tanpa menambah beban yang berlebihan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed methods) untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kontroversi implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk menggali lebih dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang menjadi dasar perdebatan terkait kebijakan Tapera, serta untuk memvalidasi temuan melalui analisis data kuantitatif yang representatif.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkap pandangan, pengalaman, dan persepsi mendalam dari berbagai pihak yang terdampak oleh kebijakan Tapera, seperti pekerja, pemberi kerja, pakar hukum, dan ekonom. Penelitian ini mengadopsi metode wawancara semi-terstruktur, di mana pertanyaan terbuka memungkinkan responden untuk memberikan jawaban yang mendalam dan mendetail. Wawancara dilakukan dengan 20 responden yang mewakili berbagai latar belakang, termasuk pekerja di sektor formal dan informal, pengusaha, serta akademisi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu yang muncul dari perspektif para responden.

Sementara itu, pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei online yang disebarluaskan kepada pekerja dan pemberi kerja di seluruh Indonesia. Survei ini mencakup pertanyaan terkait pemahaman mereka tentang Tapera, dampak finansial yang dirasakan, serta sikap mereka terhadap kebijakan tersebut. Dengan mengumpulkan data dari minimal 300 responden, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang representatif dan mendukung analisis kualitatif. Data survei dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, termasuk uji t dan analisis varian (ANOVA), untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel demografis dan persepsi terhadap kebijakan Tapera.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik mengenai kontroversi Tapera. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap berbagai aspek terkait implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang mencerminkan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh pekerja, pemberi kerja, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui kombinasi wawancara mendalam dan survei, temuan penelitian dibagi menjadi beberapa tema utama yang mencakup pemahaman kebijakan, dampak finansial, keefektifan program, serta kekhawatiran terkait pengelolaan dana.

Salah satu temuan utama adalah bahwa pemahaman tentang Tapera di kalangan pekerja dan pemberi kerja sangat bervariasi. Survei menunjukkan bahwa hampir 55% responden pekerja mengaku tidak sepenuhnya memahami mekanisme dan manfaat dari program ini. Meskipun mereka menyadari bahwa Tapera bertujuan untuk membantu dalam kepemilikan rumah, banyak yang merasa kebijakan ini lebih membebani mereka secara finansial. Sebagian besar pekerja yang diwawancara mengekspresikan kebingungan mengenai proses pendaftaran dan bagaimana tabungan yang mereka setorkan akan dikelola. Di sisi lain, pemberi kerja juga menghadapi ketidakpastian terkait kewajiban kontribusi dan dampaknya terhadap anggaran perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk sosialisasi dan edukasi yang lebih baik mengenai Tapera, sehingga semua pihak dapat memahami tujuan dan manfaatnya dengan lebih jelas. Dalam konteks ini, workshop dan seminar yang melibatkan pekerja dan pengusaha diharapkan dapat memperbaiki pemahaman tentang kebijakan ini.

Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi dampak finansial dari pemotongan gaji untuk tabungan Tapera. Sekitar 65% responden pekerja melaporkan bahwa pemotongan gaji ini mengurangi daya beli mereka, terutama di tengah kenaikan biaya hidup yang signifikan. Para pekerja yang diwawancara menyatakan bahwa mereka harus melakukan penyesuaian anggaran yang kadang-kadang berdampak pada kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam beberapa kasus, pekerja di sektor informal melaporkan bahwa fluktuasi pendapatan mereka membuat pemotongan tersebut sangat sulit untuk dikelola. Dampak ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang keseimbangan antara perlindungan sosial dan beban finansial yang harus ditanggung oleh pekerja. Dalam konteks ini, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana pemotongan gaji dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan kebutuhan dasar pekerja.

Dari analisis kuantitatif, terlihat bahwa persepsi terhadap Tapera bervariasi berdasarkan latar belakang demografis. Responden yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung lebih positif tentang manfaat Tapera, sementara mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah lebih skeptis. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan kesadaran finansial berperan besar dalam menentukan sikap terhadap kebijakan Tapera. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pekerja dengan pendidikan tinggi merasa lebih siap untuk mengelola tabungan mereka dan memahami manfaat jangka panjang dari program ini. Oleh karena itu, program edukasi dan pelatihan yang fokus pada literasi keuangan perlu ditingkatkan. Dengan meningkatkan pengetahuan finansial pekerja, mereka akan lebih mampu merencanakan keuangan dan memanfaatkan manfaat dari Tapera dengan lebih optimal.

Kekhawatiran mengenai transparansi dan pengelolaan dana Tapera juga menjadi tema utama dalam hasil penelitian ini. Responden dalam wawancara mengekspresikan keraguan tentang seberapa efektif dana tersebut dikelola dan apakah mereka akan menerima manfaat yang dijanjikan. Beberapa responden

mengutip pengalaman negatif dari program serupa di masa lalu, di mana dana pensiun atau jaminan sosial tidak dikelola dengan baik, menyebabkan kerugian bagi peserta. Untuk membangun kepercayaan, penting bagi BP Tapera untuk mengimplementasikan mekanisme transparansi yang lebih baik dan sistem pengawasan yang kuat. Misalnya, laporan tahunan yang jelas dan dapat diakses publik mengenai pengelolaan dana, serta audit independen yang rutin, dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan peserta. Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks di mana kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah sering kali dipertanyakan.

Dampak kebijakan Tapera juga dapat dilihat dari perspektif ekonomi makro. Secara keseluruhan, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor properti dan konstruksi, yang pada gilirannya dapat memberikan efek positif bagi perekonomian nasional. Namun, perlu dicatat bahwa jika implementasi Tapera tidak dilakukan dengan baik, dapat terjadi efek sebaliknya, di mana pengusaha kecil dan menengah mengalami kesulitan, yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan ini berinteraksi dengan faktor ekonomi lainnya, seperti pertumbuhan lapangan kerja dan inflasi, sangat penting.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyoroti bahwa meskipun Tapera memiliki potensi untuk meningkatkan akses perumahan bagi pekerja, kebijakan ini juga dapat menjadi beban tambahan jika tidak dikelola dengan baik. Rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan Tapera perlu mencakup peningkatan transparansi pengelolaan dana, sosialisasi yang lebih efektif mengenai manfaat dan mekanisme Tapera, serta penyediaan pelatihan literasi keuangan bagi peserta. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Tapera dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan perumahan yang layak bagi pekerja tanpa menambah beban ekonomi yang signifikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan Tapera. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan mendengarkan suara mereka, diharapkan kebijakan ini dapat berfungsi sebagai solusi yang berkelanjutan untuk tantangan perumahan di Indonesia. Penerapan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan nyata pekerja dan pemberi kerja akan menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan bahwa Tapera benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Implementasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan akses perumahan bagi pekerja, namun juga mengandung berbagai tantangan yang perlu diatasi. Meskipun kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat hak pekerja dalam memiliki rumah yang layak, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan gaji untuk tabungan Tapera sering kali menjadi beban tambahan yang mengurangi daya beli pekerja. Di sisi lain, pemahaman yang kurang mengenai mekanisme dan manfaat Tapera di kalangan pekerja dan pemberi kerja menciptakan kebingungan yang dapat menghambat partisipasi dalam program ini. Oleh karena itu, edukasi yang lebih baik dan sosialisasi yang efektif mengenai Tapera sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di seluruh stakeholder.

Untuk mencapai tujuan awal Tapera sebagai instrumen perlindungan sosial, perlu ada langkah-langkah strategis yang melibatkan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana, serta penguatan sistem pengawasan yang dapat membangun kepercayaan peserta. Selain itu, pelatihan literasi keuangan harus diperluas untuk membantu pekerja memahami dan memanfaatkan program ini secara optimal. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan Tapera dapat berfungsi sebagai solusi berkelanjutan untuk tantangan perumahan di Indonesia, memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.

REFERENSI

- Akbar, F. R. (2021). Analisis Kebijakan Perumahan di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 10(2), 45-60.
- Alamsyah, A., & Sari, R. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Tapera terhadap Pekerja. *Jurnal Ekonomi dan Ketenagakerjaan*, 8(1), 75-90.
- Bappenas. (2022). Rencana Strategis Pembangunan Perumahan Nasional. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Dewi, N. K. (2021). Implementasi Kebijakan Tapera: Tinjauan Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(3), 123-138.
- Efendi, M., & Utami, S. (2020). Analisis Peran Pemberi Kerja dalam Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 12(2), 55-70.
- Fajrin, A. (2021). Literasi Keuangan dan Pemahaman Kebijakan Tapera. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 5(4), 200-215.
- Kementerian PUPR. (2021). Pedoman Pelaksanaan Tapera. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kurniawan, J., & Santoso, H. (2022). Kesejahteraan Pekerja Melalui Kebijakan Tapera. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 7(1), 30-48.
- Putra, A. D. (2021). Kebijakan Perumahan dan Tantangan Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 13(1), 87-102.
- Rahman, A. (2020). Strategi Sosialisasi Kebijakan Tapera untuk Pekerja. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 6(2), 150-165.
- Rizky Akbar, F. (2022). Kebijakan Tapera: Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pembangunan Perumahan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 16(1), 30-50.

- Sari, D. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Tapera: Harapan dan Realita. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(3), 45-60.
- Setiawan, R. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Tapera terhadap Sektor Perumahan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 25-38.
- Siagian, S. (2020). Perlindungan Hak Pekerja dalam Kebijakan Perumahan. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 11(2), 102-118.
- Sugiharto, B. (2021). Kendala Implementasi Kebijakan Tapera di Sektor Informal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(3), 67-80.
- Susanto, M. (2020). Persepsi Pekerja Terhadap Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat. *Jurnal Sosiologi dan Antropologi*, 5(2), 90-105.
- Syahrir, F. (2022). Evaluasi Kebijakan Tapera: Harapan dan Tantangan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(4), 145-160.
- Yuliana, R. (2021). Sosialisasi dan Edukasi Kebijakan Tapera bagi Pekerja. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 4(3), 200-215.
- Zainuddin, H. (2020). Kebijakan Perumahan Rakyat dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 80-95.
- Zulkarnaen, F. (2021). Analisis Pengaruh Kebijakan Tapera terhadap Perekonomian Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 9(2), 55-70.